

EVALUASI NILAI TUKAR PETANI DAN PERAN KARTU PETANI BERJAYA UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETANI DI PROVINSI LAMPUNG

Ir. Saiful Hikam, M.Sc., Ph.D.

Jurusan Agronomi dan Hortikultura, Fakultas Pertanian Universitas Lampung

Anggota Komisi I Bidang Ketahanan Pangan dan Inovasi, Dewan Riset Daerah Provinsi Lampung 2019 - 2023

E-mail: saiful.hikam@fp.unila.ac.id

RINGKASAN

Nilai Tukar Petani (NTP) digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani. Nilai NTP dihitung berdasarkan nisbah I_t (indeks yang diterima petani) dibagi dengan I_b (indeks yang dibelanjakan petani) dalam satuan persen. Nilai NTP dihitung untuk setiap bulan pada tahun berjalan. Dengan demikian NTP menguntungkan bila lebih besar dari 100. Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Petani (NTUP) dihitung dengan mengeluarkan biaya konsumsi dan nonpertanian lainnya dari I_b sehingga $NTUP > NTP$. Analisis data NTP dan NTUP Nasional November 2015 - 2021 menunjukkan bahwa $NTUP > NTP$ tetapi NTUP sangat dinamis. Analisis NTP Provinsi Lampung pada periode yang sama menunjukkan nilai dan dinamika yang lebih besar dibandingkan NTP Nasional. Dinamika data pada NTP partisi subsektor pertanian: Padi dan Palawija, Hortikultura, Perkebunan Rakyat, Peternakan, Perikanan Tangkap, dan Perikanan Budidaya menghasilkan tren yang menurun bila dinamika terlalu besar. Untuk melandaikan dinamika dan tren, program Kartu Petani Berjaya dapat diandalkan dengan manajemen dan pengawasan terhadap lima hal penting yaitu: luasan, cakupan, besaran, durasi, dan respekasi terhadap program tersebut.

Kata kunci: analisis tren linier, Kartu Petani Berjaya, kesejahteraan petani, NTP, NTUP

I. PENDAHULUAN

Nilai Tukar Petani (NTP) adalah nisbah antara rupiah yang diterima petani (*revenue*) dan rupiah yang dibelanjakan (*cost*) sebagai modal untuk usaha pertaniannya dalam satuan persen.

Badan Pusat Statistik (BPS, 2011) merumuskan Nilai Tukar Petani (NTP) adalah nisbah antara indeks harga yang diterima petani (*It*) dengan indeks harga yang dibayar petani (*Ib*) dalam satuan persen ($\times 100\%$):

$$NTP = (It/Ib) \times 100$$

Nilai Tukar Petani selanjutnya digunakan sebagai indikator untuk mengukur daya beli dan tingkat kesejahteraan petani bila nilainya > 100 (BPS Provinsi Lampung, 2015 - 2021).

Berdasarkan pengertian tersebut, NTP dapat dikelompokkan menjadi tiga satuan penting yaitu:

1. NTP < 100 yang berarti petani mengalami kerugian karena $Ib > It$.
2. NTP = 100 yang berarti petani mengalami kembali modal (*break-even*) dan petani tidak menerima kelebihan penerimaan dari harga penjualan ($Ib = It$).
3. NTP > 100 yang berarti petani menerima keuntungan karena $Ib < It$.

Baik *Ib* maupun *It* adalah parameter dinamik. Belanja pertanian (*Ib*) dikendalikan dari luar pertanian seperti harga sarana produksi pertanian (*saprotan*): pupuk, pestisida dan herbisida; alat mesin pertanian (*alsintani*) sehingga *Ib* berubah berdasarkan *supply versus demand*. Penerimaan dari penjualan produksi (*It*) berubah terutama dari dari lamanya waktu simpan. Makin lama petani mampu menyimpan panennya akan semakin tinggi *It* yang diterima. Tetapi hampir semua petani harus segera menjual pada saat panen karena beban utang selama waktu tunggu mulai dari pengolahan lahan sampai panen; untuk hortikultura adanya risiko cepat rusak (*perishable*); untuk peternakan dan perikanan akan terbebani biaya pemeliharaan dan pakan sehingga *It* yang diterima menjadi terminimalisir.

Bila nisbah yang diperoleh adalah 100 dikatakan bahwa usaha pertanian berada pada Titik Impas (*Break-Even Point*), sedangkan bila nisbah yang diperoleh < 100 maka usaha pertanian mengalami

kerugian. Jadi jelaslah bahwa nisbah yang menguntungkan harus >100. Tetapi apakah keuntungan yang diterima telah dapat menyejahterakan keluarga tani?

Pertanyaan ini muncul karena tidak ada satupun kesepakatan tentang berapa besar NTP yang dapat dikatakan menguntungkan dan menyejahterakan keluarga tani sehingga usahatani dapat menjadi satu-satunya mata pencarian keluarga tani.

Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Petani (NTUP) adalah besaran yang juga digunakan untuk menghitung penghasilan petani yang diperoleh dari usahatani mereka tetapi tidak memasukkan konsumsi dan biaya nonpertanian lainnya seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, *rest and recuperation* sebagai lb. Dengan demikian lb mengecil dan NTUP menjadi > NTP.

Program Kartu Petani Berjaya diinisiasi oleh Gubernur Provinsi Lampung 2019 - 2024 sebagai pengejawantahan 33 Janji Pembangunan Daerah. Program KPB berlanjut dengan manajemen dan pengawasan terhadap lima hal penting yaitu: luasan, cakupan, besaran, durasi, dan respekasi terhadap program tersebut.

II. BAHAN DAN METODE PENULISAN

Penulisan makalah ini ditujukan untuk menyumbang artikel Dewan Riset Daerah Provinsi Lampung di dalam satu buku Bunga Rampai Dewan Riset Daerah Provinsi Lampung 2021. Makalah menganalisis pentingnya NTP di dalam menentukan seberapa jauh keberhasilan usahatani untuk setiap subsektor pertanian yaitu: NTP-P untuk padi dan palawija, NTP-H untuk hortikultura, NTP-Pr untuk perkebunan rakyat, NTP-Pt untuk peternakan, NTP-It untuk perikanan tangkap, dan NTP-Ib untuk perikanan budidaya.

Data NTP dihitung per bulan dalam setiap tahunnya, tetapi untuk makalah ini hanya menganalisis data per November setiap tahun dari 2015 - 2021 (BPS Provinsi Lampung, 2015 - 2021). Analisis yang dibatasi hanya per November 2015 - 2021 berdasarkan kenyataan bahwa November adalah bulan ketika petani padi-palawija telah selesai menanam lahannya untuk periode Musim Penghujan II dengan memanfaatkan keuangan keluarga yang diperoleh dari panen Musim Penghujan I dan Musim Gadu.

Analisis data NTP kemudian dipadukan dengan analisis NTUP untuk menentukan seberapa penting NTUP terhadap total penghasilan keluarga petani. Lonjakan dinamik pada grafik analisis NTUP menjadi kesimpulan bahwa usahatani saja, walau mampu memberi keuntungan usahatani, tetapi belum mampu mensejahterakan petani sehingga memerlukan rumah tangga sebagaimana yang dianalisis dalam NTUP.

Lonjakan dinamik pada grafik analisis partisi NTP-P, NTP-H, NTP-Pr, NTP-Pt, NTP-It, dan NTP-Ib harus dilanjutkan dengan analisis tren linier untuk mengetahui kecenderungan perubahan dinamik tersebut menaik (menguntungkan) atau menurun (merugikan) untuk menentukan kebijakan pada tahun berikutnya (Lin et al., 2020).

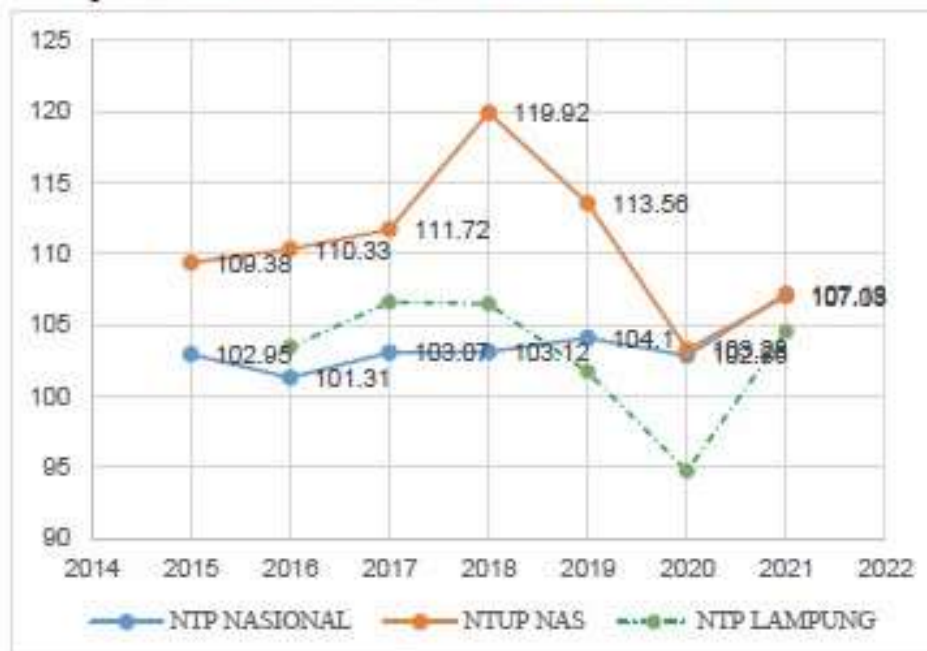
Program Kartu Petani Berjaya (KPB) merupakan salah satu dari 33 Janji Pembangunan Daerah yang telah diinisiasi oleh Gubernur Provinsi Lampung sejak 2020. Program KPB bermanfaat untuk menutup celah pemberian subsidi Pemerintah yang selama ini masih terjadi dengan lima cara yaitu: luasan penyebaran KPB yang meliputi seluruh Provinsi Lampung; cakupan penyebaran KPB yang meliputi seluruh subsektor pertanian; besaran bantuan/subsidi yang diterima oleh pemegang KPB; durasi program KPB yang sulit untuk dilakukan selamanya, tetapi paling tidak ada sasaran dan capaian yang jelas dan terhitung (*tangible and accountable*); dan pelaksanaan Program KPB harus direspektasi oleh pasar saprotan karena merupakan subsidi yang menjadi tanggungan Pemerintah Daerah.

III. POKOK-POKOK BAHASAN

3.1 Posisi NTP Provinsi Lampung terhadap NTP dan NTUP Nasional

Grafik pada Gambar 1 merupakan NTP Provinsi Lampung yang dibandingkan dengan NTP dan NTUP Nasional. Angka nisbah hanya dicantumkan pada NTP dan NTUP Nasional. Bulan November diambil sebagai data yang dianalisis karena pada bulan November telah menerima *revenue* panen rendeng pertama di bulan Maret dan gadu di bulan September dan sudah menginvestasi *cost* untuk tani rendeng kedua di bulan Desember.

Gambar 1 menunjukkan bahwa NTP Nasional cenderung stabil berkisar antara 101.31 – 107.18, tetapi terjadi fluktuasi yang sangat besar pada NTUP Nasional berkisar antara 103.28 – 119.92.



Gambar 1. Gambaran NTP Provinsi Lampung dalam perbandingannya dengan NTP Nasional dan NTUP Nasional. Data diambil setiap November dari tahun 2015 – 2021. (Sumber data: BPS NTP November 2015 – 2021)

Dari Gambar 1 dapat ditafsirkan bahwa:

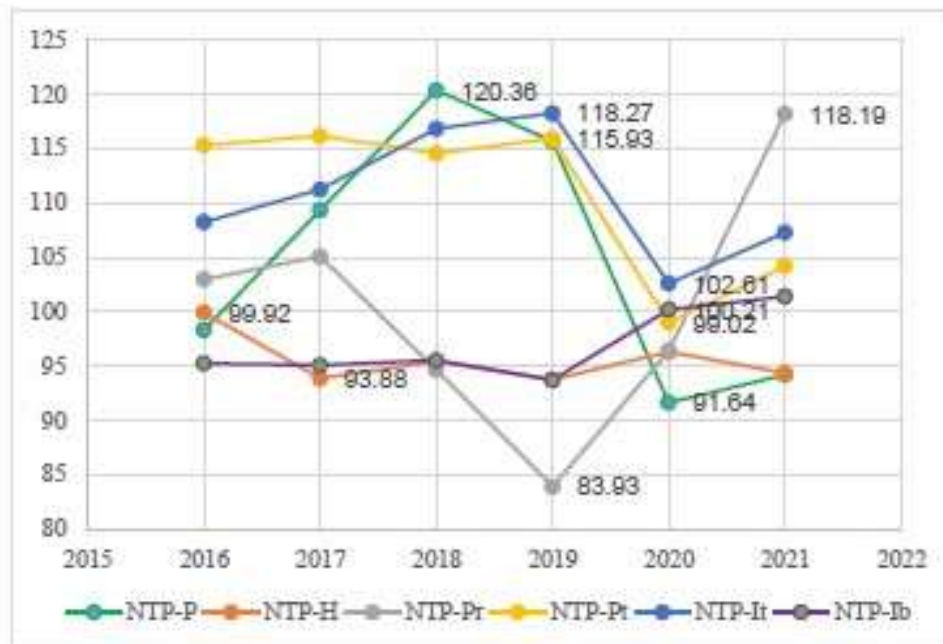
- (1) Pergerakan NTP Nasional November 2015 – 2021 cenderung melandai pada nilai minimum – maksimum 101.31 – 107.18, sedangkan pergerakan NTP Provinsi Lampung lebih progresif pada nilai minimum - maksimum 94.74 – 106.62
- (2) Faktor-faktor yang menyebabkan menurunnya NTP Provinsi Lampung pada tahun 2020 pada level merugikan (94.74) harus diteliti lebih serius dan disiapkan langkah-langkah penanggulangannya sehingga tidak terulang lagi.
- (3) Beberapa faktor yang dapat dikemukakan sebagai penyebab menurunnya NTP Provinsi Lampung pada November 2020 adalah:

1. Musim kemarau yang berkepanjangan sehingga menyebabkan defisit kebutuhan air untuk pertanian padi gadu dan palawija.
 2. Serangan hama ulat grayak jagung (*Spodoptera frugiperda*) sejak tahun 2019 yang telah merusak pertanian padi dan palawija di 12 provinsi termasuk Provinsi Lampung. Ulat grayak ini termasuk hama pemakan semua tanaman hijau (*omniphage*) yang sulit dikendalikan (ditlin.tanamanpangan.pertanian.go.id., 2020)
 3. Rusaknya pertanian dan panen jagung mengimbas kepada naiknya harga pakan konsentrat untuk peternakan dan perikanan budidaya.
 4. Pada bulan November 2020 terdapat anomali penurunan harga dengan cepat (*glitch on price*) pada panen singkong kasava.
- (4) Pergerakan NTUP Nasional November 2021 lebih progresif dibandingkan pergerakan NTP Nasional pada periode yang sama dengan nilai minimum - maksimum 103.28 - 113.56 yang menunjukkan bahwa usaha rumah tangga petani menjadi faktor penting untuk mencukupi kebutuhan belanja keluarga petani.
- (5) Sampai dengan November 2021 belum ada data NTUP Provinsi Lampung sehingga tidak dapat dianalisis progresivitasnya.

3.2 Partisi Progresivitas NTP Provinsi Lampung berdasarkan NTP Subsektor Pertanian.

Grafik pada Gambar 2 menunjukkan progresivitas enam partisi subsektor pertanian Provinsi Lampung yang memberi partisipasi kepada analisis NTP Provinsi Lampung. Enam partisi subsektor pertanian tersebut adalah:

1. NTP Padi dan Palawija
2. NTP Hortikultura
3. NTP Perkebunan Rakyat
4. NTP Peternakan
5. NTP Perikanan Tangkap
6. NTP Perikanan Budidaya



Gambar 2. Progresivitas NTP partisi untuk setiap subsektor pertanian. NTP-P: NTP Padi dan Palawija, NTP-H: NTP Hortikultura, NTP-Pr: NTP Perkebunan Rakyat, NTP-Pt: NTP Peternakan, NTP-It: NTP Perikanan Tangkap, NTP-Ib: NTP Perikanan Budidaya. (Sumber data: BPS Propinsi Lampung NTP November 2016 - 2021)

Dari Gambar 2 tampak jelas bahwa yang subsektor pertanian yang berperan penting dan selalu bernilai di atas 100 adalah:

- (1) Subsektor Peternakan (NTP-Pt) dengan nilai minimum - maksimum (99.02) 104.2 - 116.18. Menurunnya nilai NTP-Pt pada November 2020 menjadi 99.02 dari 115.93 pada tahun 2019 jelas disebabkan oleh menurunnya produksi jagung yang diakibatkan oleh kerusakan berat pada pertanian jagung akibat serangan ulat grayak jagung (*Spodoptera frugiperda*). Biji jagung pipilan merupakan bahan utama dalam pembuatan pakan konsentrat ternak. Tetapi pada November 2021 nilai NTP-Pt kembali naik menjadi 104.21.
- (2) Subsektor Perikanan Tangkap (NTP-It) dengan nilai minimum - maksimum 102.61 - 118.27.

Sedangkan subsektor pertanian yang perlu diperhatikan manajemen pemeliharaan dan pengembangannya adalah:

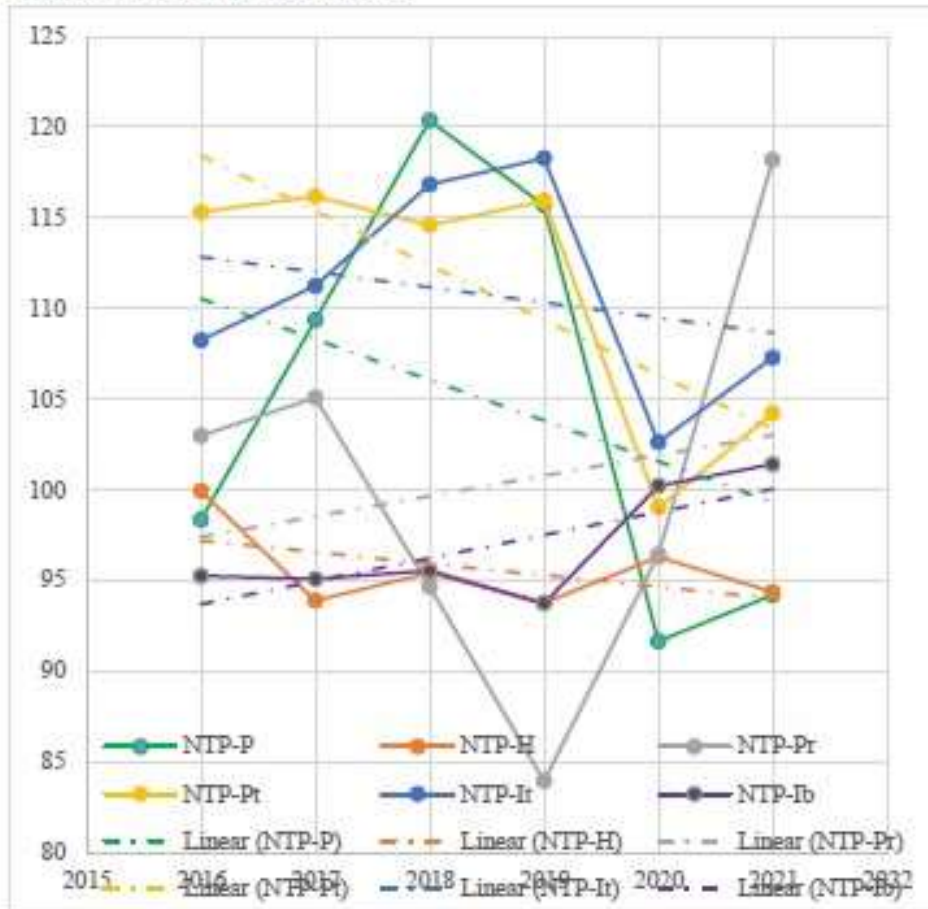
- (1) Subsektor Hortikultura (NTP-H) dengan nilai minimum - maksimum 93.88 - 99.92. Secara khusus untuk subsektor hortikultura adalah kelangkaan usahatani hortikultura dalam skala luas dan kualitas produksi yang belum memenuhi baku mutu yang diharapkan oleh konsumen. Pemenuhan kebutuhan produk hortikultura untuk Provinsi Lampung masih didatangkan dari pulau Jawa dan Provinsi Sumatera Utara.
- (2) Subsektor Perkebunan Rakyat (NTP-Pr) dengan nilai minimum - maksimum 83.93 - 118.19. Penurunan nilai NTP-Pr terjadi pada November 2018 - 2020 dan melonjak naik ke 118.19 pada November 2021 dengan membaiknya harga ekspor karet dan CPO. Dampak kenaikan permintaan dan harga ekspor CPO memberi dampak nasional berupa kenaikan harga minyak goreng di dalam negeri sejak Desember 2021.
- (3) Subsektor Perikanan Budidaya (NTP-Ib) dengan nilai minimum - maksimum 93.72 - 101.40. Peningkatan NTP-Ib di atas 100 baru terjadi pada November 2020 dan 2021.

Secara khusus untuk Subsektor Padi dan Palawija, NTP-P memberi partisi yang sangat progresif terhadap nilai NTP Provinsi Lampung secara keseluruhan dengan nilai minimum - maksimum 91.64 - 120.36, nilai tertinggi yang diberikan oleh subsektor pertanian partisi pada November 2018 yang naik 11 poin dari 109.35 pada November 2017. Kenaikan ini merupakan dampak dari Program Pajale (Padi Jagung Kedele) yang diluncurkan oleh Kementerian Pertanian 2015 - 2017 dan dilanjutkan dengan Program Intensifikasi Kedelai 2018 (www.pertanian.go.id, 2019). Di sisi lain, pertanian singkong kasava mengalami krisis harga jual ubi basah dari Rp1700/kg menjadi hanya Rp500/kg

Tetapi berturut-turut pada November 2020 NTP-P menurun menjadi 91.64 karena faktor alam iklim El Nino yang kering dan serangan ulat grayak jagung *Spodoptera frugiperda* naik kembali ke 94.19 pada November 2021

3.3 Analisis Tren Linier Setiap Subsektor Pertanian untuk Pendugaan Progresivitas NTP Masing-Masing Subsektor

Grafik pada Gambar 3 menyatukan progresivitas NTP partisi untuk setiap subsektor pertanian sehingga tersusun grafik tren linier untuk setiap subsektor.



Gambar 3. Analisis tren linier untuk setiap subsektor pertanian. NTP-P: NTP Padi dan Palawija, NTP-H: NTP Hortikultura, NTP-Pr: NTP Perkebunan Rakyat, NTP-Pt: NTP Peternakan, NTP-It: NTP Perikanan Tangkap, NTP-Ib: NTP Perikanan Budidaya. (Sumber data: BPS Provinsi Lampung NTP November 2016 - 2021)

Pada Gambar 3 tersaji grafik tren linier untuk setiap subsektor pertanian: Padi dan Palawija, Hortikultura, Perkebunan Rakyat, Peternakan, Perikanan Tangkap, dan Perikanan Budidaya. Ternyata progresivitas NTP subsektor mengakibatkan tren yang menurun dari November 2016 – 2021, kecuali untuk subsektor Perikanan Tangkap dan Perikanan Budaya.

Berdasarkan analisis statistika tren linier, tren menurun selalu terjadi bila data terakhir berada lebih rendah dari data tertinggi sebelumnya pada grafik data (Lind et al., 2020). Kenyataan ini memberi informasi bahwa perbaikan teknologi dan manajemen berperan penting untuk selalu mempertahankan data yang menaik secara graduil (bertahap-sinambung) dibandingkan menaikkan data secara pesat pada satu periode pengukuran tetapi tidak sinambung pada periode-periode pengukuran berikutnya. Mempertahankan seraya meningkatkan teknologi dan manajemen merupakan kunci keberhasilan pembangunan pertanian yang baik.

3.4 Jenis dan Produksi pada Subsektor Pertanian 2018 untuk Masing-Masing Partisi dan Pengembangannya

Data pada Tabel 1 memberi gambaran komoditas utama untuk setiap partisi subsektor pertanian yang berpeluang untuk dikembangkan lebih lanjut.

Tabel 1. Jenis dan produksi masing-masing subsektor pertanian Provinsi Lampung tahun 2018

Subsektor Padi dan Palawija		Subsektor Hortikultura		Subsektor Perkebunan Rakyat	
Komoditas	Produksi (ton)	Komoditas	Luas Panen (ha)	Komoditas	Produksi (ton)
Padi	4343586	Bawang Merah	472	Kopi Robusta	110570
Jagung	2449016	Cabai	9151	Karet	156120
Kedelai	70012	Kubis	537	Kelapa Dalam	85918
Singkong	5055614	Kentang	57	Kakao	58251
Kasava				Kelapa Sawit	190339

Tabel 1. (Lanjutan)

Subsektor Peternakan		Subsektor Perikanan Tangkap		Subsektor Perikanan Budidaya	
Komoditas	Jumlah (ekor)	Komoditas	Produksi (ton)	Komoditas	Produksi (ton)
Sapi	827217	Perikanan Laut	161651	Budidaya Laut	3922
Kerbau	23489	Perairan Umum	5590	Tambak	61339
Sapi Perah	763			Kolam	82366
Kambing	1430416			Keramba	879
Domba	76654			Jaring Apung	7479
Babi	43486			Sawah	150
Ayam Pedaging	43.879.705				
Ayam Petelur	6.395.569				

Sumber data: BPS Provinsi Lampung (2018)

Pengembangan komoditas pertanian untuk setiap subsektor mempunyai kendala yang berbeda baik kendala alam (kekeringan, banjir, serangan hama-penyakit tanaman) maupun kendala usahatani seperti:

- (1) Subsektor Pertanian dan Palawija dan Hortikultura: pengadaan benih unggul, pupuk dan pestisida, alsintani, tenaga kerja, transportasi, pemasaran, dan harga di tingkat petani (*farm-gate price*) sewaktu panen. Untuk Subsektor Hortikultura kendala tersebut bertambah dengan sifat komoditas yang mudah rusak (*perishable*) sehingga harus segera dijual di saat panen dengan harga yang mau tidak mau harus diterima oleh petani (*forced price*; studylibid.com, 2016).
- (2) Subsektor Perkebunan Rakyat: terutama pada pengadaan pupuk dan pestisida, pemeliharaan dan panen yang memerlukan tenaga kerja, serta beberapa produksi seperti singkong kasava dan kelapa sawit bersifat mudah rusak sehingga harus segera dijual pada saat panen.
- (3) Subsektor Peternakan dan Perikanan Budidaya yang pada umumnya berupa usahatani pemeliharaan dan pembesaran mempunyai kendala pengadaan bibit bakalan, pemeliharaan kandang dan kolam, pembelian pakan hijau dan pakan konsentrat, dan obatan untuk mengendalikan penyakit.

Subsektor Peternakan dan Perikanan Budidaya mempunyai ketetapan waktu berapa lama pemeliharaan dan pembesaran yang tidak dapat dilambatkan karena akan berisiko menaikkan biaya pemeliharaan dan pembesaran yang dihitung per hari.

- (4) Subsektor Perikanan Tangkap: dengan beralihnya penangkapan ikan dari menggunakan bagan tancap menjadi menggunakan bagan perahu wilayah penangkapan ikan nelayan di Provinsi Lampung menjadi semakin luas, tetapi pemakaian BBM biosolar meningkat. Selain itu nelayan sering mengalami kesulitan dalam pengadaan dan perbaikan jaring, servis dan suku cadang motor penggerak, kebutuhan es balok untuk mendinginkan ikan tangkapan sebelum didaratkan.

Kendala pada subsektor pertanian untuk setiap partisipasinya harus dicermati dan diberi solusi dan ditangani secara profesional dengan biaya yang tidak memberatkan petani.

3.5 Peran Program Kartu Petani Berjaya dalam Meningkatkan Nilai Tukar Petani dan Kesejahteraan Petani.

Pertama harus diingat bahwa keberhasilan suatu usahatani tidak hanya ditentukan oleh profesionalitas petani dan bantuan sarana-produksi pertanian (saprota). Program Insus (Intensifikasi Khusus) dan Supra Insus yang diluncurkan 1980 - 1998 berhasil mengentaskan "ketertinggalan (*ignorance*)" petani terhadap modernisasi teknologi dan manajemen usahatani. Kegagalan usahatani sejak periode 2000 lebih kepada faktor alam kekeringan atau banjir, faktor hama-penyakit tanaman terutama serangan tikus, hama serangga eksplosif, dan penyakit bakteri dan cendawan eksplosif. Sebagai contoh 2019 - 2021 terjadi eksplosif ulat grayak jagung *Spodoptera frugiperda* dan sejak Agustus 2021 terjadi eksplosif tikus.

Kedua harus diingat adanya faktor non-teknis berupa kendala penyediaan saprota dalam bentuk ketepatan jumlah dan ketepatan jenis yang diperlukan serta ketepatan waktu penyediaan. Subsidi Pemerintah tidak mencakup seluruh saprota, diutamakan hanya terhadap pupuk urea, SP36, dan pupuk majemuk NPK. Belum ada subsidi untuk benih bersertifikat, hanya terkadang Pemerintah

memberi bantuan proyek pengadaan benih untuk wilayah terbatas. Begitu juga untuk pestisida dan herbisida belum diberi subsidi mengingat sangat banyaknya perusahaan/industri yang menjual produk dengan merek yang berbeda walaupun menggunakan bahan aktif (*active ingredient*) yang sama.

Ketiga subsidi Pemerintah diberikan terutama untuk tanaman padi sawah dan melalui Kelompok Tani. Untuk komoditas lain Pemerintah menetapkan harga dasar (*floor price*) untuk melindungi petani produsen dan harga eceran tertinggi (*HET/ceiling price*) untuk melindungi konsumen pengguna (*studylibid.com*, 2016)

Dengan demikian Program Kartu Petani Berjaya (KPB) (*www.econ.go.id*, 2021) bermanfaat untuk menutup celah-celah kemahalan, keterlambatan penyediaan, kekurangan volume dan ketidaktepatan jenis saprotan yang selama ini masih terjadi dengan lima cara:

1. Luasan penyebaran KPB yang meliputi seluruh Provinsi Lampung.
2. Cakupan penyebaran KPB yang meliputi seluruh subsektor pertanian.
3. Besaran bantuan/subsidi (Rp.) yang diterima oleh pemegang KPB.
4. Durasi program KPB yang sulit untuk dilakukan selamanya, tetapi paling tidak ada sasaran dan capaian yang jelas dan terhitung (*tangible and accountable*).
5. Respektasi Program KPB harus dihargai oleh pasar saprotan karena merupakan subsidi yang menjadi tanggungan Pemerintah Daerah. Penyelia Program KPB merupakan unit kerja Pemerintah Daerah yang dapat dengan cepat menyelesaikan pertikaian yang terjadi antara pemegang KPB dengan penyedia saprotan.

IV. REKOMENDASI

Berdasarkan uraian pada Bab III, penulis merekomendasikan tiga hal penting yaitu:

- (1) Data NTP (Nilai Tukar Petani) untuk Provinsi Lampung dilanjutkan pengambilannya dan secara periodik 2 - 3 tahun sekali dianalisis untuk menguji keberhasilan program pertanian yang telah diaplikasikan dalam periode tersebut.

- (2) Data NTUP (Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Petani) untuk Provinsi Lampung segera diambil dan dikemas oleh BPS Provinsi Lampung karena berdasarkan data nasional NTUP diperlukan sebagai pelengkap NTP di dalam menilai keuntungan dan kesejahteraan keluarga petani.
- (3) Program KPB (Kartu Petani Berjaya) berlanjut dengan manajemen dan pengawasan terhadap lima hal penting yaitu: luasan, cakupan, besaran, durasi, dan respektasi terhadap program tersebut.

V. KESIMPULAN

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan peubah yang bagus untuk mengukur keberhasilan pendapatan/keuntungan pertanian pada setiap bulan dalam setiap tahun. Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan peubah yang dinamis dan terukur pada durasi pendek sehingga dapat memberi gambaran untuk perbaikan dan peningkatan program pada tahun berikutnya. Tetapi NTP belum merupakan peubah yang mengukur kesejahteraan petani, terbukti dari NTUP (Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Petani) yang bergerak lebih dinamis pada nilai yang lebih tinggi daripada NTP. Hal ini membuktikan bahwa analisis NTP harus diimbahi dengan dengan analisis NTUP untuk menghitung kecukupan biaya hidup petani dari bulan kebulan dalam setahunnya. Selanjutnya analisis tren linier akan mengukur tren yang menurun bila gelonjak nilai minimum – maksimum NTP sangat besar.

Program Kartu Petani Berjaya (KPB) bermanfaat untuk menutup celah pemberian subsidi Pemerintah yang selama ini masih terjadi dengan lima cara yaitu: luasan penyebaran KPB yang meliputi seluruh Provinsi Lampung; cakupan penyebaran KPB yang meliputi seluruh subsektor pertanian; besaran bantuan/subsidi yang diterima oleh pemegang KPB; durasi program KPB yang sulit untuk dilakukan selamanya, tetapi paling tidak ada sasaran dan capaian yang jelas dan terhitung (*tangible and accountable*); dan pelaksanaan Program KPB harus dihargai oleh pasar saprotan karena merupakan subsidi yang menjadi tanggungan Pemerintah Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

1. BPS Provinsi Lampung. 2015 – 2021. Nilai Tukar Petani (NTP)
2. ditlin.tanamanpangan.pertanian.go.id. 2020. Pengendalian Ulat Grayak Frugiperda, Amankan Produksi
3. Lind D.A, W.G. Marchal, S.A. Wathen. 2020 *Statistical Techniques in Business & Economics*. An E-Book.
4. studylibid.com/doc/860916. 2016. Penetapan harga (*ceiling price* dan *floor price*). Bentuk intervensi.
5. www.econ.go.id. 2021. Kartu Petani Berjaya Program Unggulan Propinsi Lampung.
6. 6. www.pertanian.go.id. 2019. Meniti Jalan Swasembada Pajale - Kementerian Pertanian.